Tribun Bali

Mobil Dinas Dewan Belum Dikembalikan

Tunjangan Transportasi Rp 5,2 Miliar Sudah Disahkan

DENPASAR, TRIBUN BALI- Anggaran untuk menunjang transportasi anggota DPRD Denpasar Rp 5,2 miliar lebih sudah disahkan. Sebagai gantinya dalam PP 18 tahun 2017 itu mobil dinas dewan harus dikembalikan. Hanya saja, meski sudah dipastikan dapat tambahan dana transportasi, namun Pemkot Denpasar hingga kemarin belum memastikan akan menarik mobil tersebut.

Dalam PP 18 tahun 2017, dijelaskan apabila Pemda sudah bisa memfasilitasi para wakil rakyatnya kendaraan dinas, maka tunjangan transportasi tidak bisa lagi diberikan. Dan sebaliknya, jika sudah diberikan tunjangan, mobil dinas harus dikembalikan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Pemkot Denpasar 2017 yang sudah disahkan pada Senin lalu, tercantum anggaran untuk menunjang transportasi dewan Rp 5.287.500.000.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar AAN Rai Iswara mengaku belum berani

BERSAMBUNG ❯ HAL 7

Harus Taat Aturan

ANGGOTA DPRD Denpasar AA Susruta Ngurah Putra mengatakan, semua mobil yang dipinjamkan kepada anggota dewan ditanggung sepenuhnya oleh anggota dewan. Apabila nanti keputusannya dewan diberikan tunjangan transportasi, maka pria asal Puri Gerenceng Denpasar ini mengaku siap mengembalikan kendaraan pinjaman tersebut.

"Kami harus taat aturan. Kalau sudah diberikan tunjangan transportasi, artinya fasilitas transport (mobil yang dipinjamkan) wajib dikembalikan," kata anggota dewan partai Demokrat itu.

Pun begitu dengan AA Gede Mahendra, anggota DPRD Denpasar dari Fraksi Golkar. Wakil rakyat asal Denpasar Barat itu mengaku mobil harus dikembalikan apabila nantinya anggota dewan diputuskan mendapat tunjangan transportasi. "PP 18 tahun 2017 itu memberikan tunjangan transportasi kepada anggota dewan sehingga mobil tersebut wajib dikembalikan," kata Gung Mahendra. **(win)**

Edisi : Rabu, 2 Agustus 2017

Hal : 8

Tribun Bali

Orangtua Harus Iuran Rp 1 Juta

SD Negeri 7 Gianyar Kekurangan Ruang Belajar

GIANYAR, TRIBUN BALI - Sejumlah orangtua siswa kelas I SD Negeri 7 Gianyar mengaku terbebani kebijakan sekolah. Sebab mereka diminta biaya sekolah Rp 1 juta. Biaya tersebut dipergunakan pengadaan bangku sekolah hingga rehab rumah dinas kepala sekolah yang akan dijadikan ruang belajar.

Berdasarkan data yang diterima *Tribun Bali*, seorang wali murid, Selasa (1/8) mengaku setiap wali murid kelas I dikenakan iuran Rp 1 juta. Nantinya iuran tersebut dibagi untuk dua pemanfaatan. Adalah Rp 680 ribu dipergunakan untuk pengadaan bangku belajar dan rehab rumah kepala sekolah untuk ruang kelas. Sedangkan sisanya, Rp 320 ribu akan dipergunakan untuk membeli seragam endek dan seragam olahraga beserta atributnya.

Kepala SD 7 Gianyar, Pudji Winarni belum bisa memberikan penjelasan terkait kebijakan ini. Pasalnya saat akan dikonfirmasi sedang tidak ada di sekolah. Wakil kepala SD 7 Gianyar, yang tak mau ditulis namanya meminta agar ditanyakan langsung ke komite sekolah.

Ketua Komite SD Negeri 7 Gianyar, Nur Agung Cahyono melalui sambungan telepon selulernya menjelaskan, keputusan tersebut sudah dimusyawarahkan bersama semua wali murid. Uang Rp 1 juta tersebut akan digunakan untuk merehab rumah dinas kepala sekolah menjadi bangunan ruang kelas. Kebutuhan ini dinilai mendesak mengingat jumlah siswa kelas 1 mencapai 87 siswa.

"Saat ini, dengan bangunan yang ada siswa kelas II yang mengalah menjadi masuk siang. Dan tenaga guru yang ada harus menambah waktu mengajarnya lebih panjang. Dengan merehab rumah dinas jadi ruang kelas, nantinya siswa kelas II akan kembali masuk pagi," tuturnya.

Agung menyebut, dana yang dibutuhkan untuk merehab dan membeli bangku sekitar Rp 65 juta. "Sisanya untuk membeli seragam. Kenapa ini melibatkan orangtua, karena kebutuhan mendesak. Untuk pengadaan mebel dan bangunan ini sebenarnya sudah sering diajukan ke dinas. Namun, sampai sekarang belum terealisasi, sementara siswa sangat membutuhkan," jelasnya.

Agung mengaku, saat pertemuan komite sudah dibuatkan berita acara dan pernyataan untuk ikut menyumbang. "Saya sampaikan saat itu, bila ada yang keberatan bisa langsung bertemu kepala sekolah atau ketua komite. Kami sudah hitung, akan ada kebijakan untuk meringankan orangtua yang memang keberatan. Namun, sampai sekarang tidak ada yang datang," sebutnya. **(weg/rki)**

Edisi : Rabu, 2 Agustus 2017
Hal : 8